

## Preferensi Bermukim Tenaga Kerja Kawasan Industri Makassar

Herman<sup>1</sup>, Asnawi<sup>2</sup>

Diterima : 26 Mei 2016

Disetujui : 18 Juli 2016

### ABSTRACT

The consequences of population growth is the increasing housing needs of the community. Labor is part of the low and middle-income people should get the attention of government and developers to meet the housing needs. Problems of housing and settlements can not be regarded as a functional and purely physical problems, but more complex as the problems related to the dimensions of social life that includes social, economic, cultural, ecological, technological and political. Provision of occupancy against labor by governments or developers should consider the desire and tendency to settle labor based on its characteristics as a prospective occupant so as to create housing that is accommodative to the occupants. Preferences settled labor of Makassar Industrial Estate is divided into four categories, which are not thinking of moving their homes, thinking of moving residential, residential moving plan and is ready to move occupancy. Based on the study of labor industrial area of Makassar, obtained results indicate that there are 59% of the workforce did not think to move dwelling occupied at the moment. 32% of its workforce started thinking to relocate occupancy but do not know the right time to move on, 7% of its workforce is planning to move the occupancy by a predetermined time and 2% of the workforce that is ready to move current occupancy. Socio-economic characteristics, housing and residential environment that significantly affect labor preference settled industrial area of Makassar is marital status, type of occupancy, status of ownership and residential neighborhood tranquility.

**Keywords:** Characteristics, Labor, Preferences Settled

### ABSTRAK

Konsekuensi dari pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya kebutuhan hunian masyarakat. Tenaga kerja yang merupakan bagian dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah selayaknya mendapatkan perhatian pemerintah dan pengembang dalam pemenuhan kebutuhan hunian. Permasalahan perumahan dan permukiman tidak dapat dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks lagi sebagai permasalahan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan bermasyarakat yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, ekologi, teknologi dan politik. Penyediaan hunian terhadap tenaga kerja oleh pemerintah maupun pengembang seharusnya mempertimbangkan keinginan dan kecenderungan bermukim tenaga kerja berdasarkan karakteristik yang dimilikinya sebagai calon penghuni sehingga tercipta hunian yang akomodatif terhadap penghuninya. Preferensi bermukim tenaga kerja kawasan industri Makassar dibedakan menjadi empat kategori, yaitu tidak berpikir pindah hunian, berpikir pindah hunian, rencana pindah hunian dan siap pindah hunian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap tenaga kerja kawasan industri Makassar, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat 59% tenaga kerja yang tidak memikirkan untuk pindah hunian yang ditempati saat ini. Sebanyak 32% tenaga kerja yang mulai berfikir untuk pindah hunian namun belum mengetahui waktu yang tepat untuk pindah, sebanyak 7% tenaga kerja yang berencana pindah hunian dengan waktu yang telah ditentukan dan terdapat 2% tenaga kerja yang siap untuk pindah hunian saat ini. Karakteristik sosial ekonomi, hunian dan lingkungan hunian yang secara signifikan mempengaruhi preferensi bermukim tenaga kerja kawasan industri Makassar adalah status perkawinan, tipe hunian, status kepemilikan dan ketenangan lingkungan hunian.

**Kata Kunci:** Karakteristik, Tenaga Kerja, Preferensi Bermukim

<sup>1</sup> Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan  
Kontak Penulis : mr.herman7979@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah

## PENDAHULUAN

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan karakter sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Negara mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan perumahan untuk memenuhi hak asasi manusia agar mampu bertempat tinggal dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau. Pemerintah dituntut untuk lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan serta bantuan perumahan melalui penyelenggaraan perumahan berbasis kawasan dan keswadayaan masyarakat sebagai satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya untuk keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Konsekuensi dari pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya kebutuhan hunian masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk Kota Makassar dari tahun 2013 sampai tahun 2014 sebesar 400.000 jiwa. Jika rata-rata jumlah penghuni dalam satu rumah sebanyak lima orang, maka kebutuhan hunian selama satu tahun menjadi 80.000 unit hunian. Angka tersebut belum termasuk perbaikan hunian yang tidak layak huni. Tenaga kerja yang merupakan bagian dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah selayaknya mendapatkan perhatian pemerintah dan pengembang dalam pemenuhan kebutuhan hunian. Kemampuan daya beli tenaga kerja yang rendah menjadikan mereka sulit menjangkau hunian yang layak. Penyediaan hunian terhadap tenaga kerja oleh pemerintah maupun pengembang harusnya mempertimbangkan keinginan dan kecenderungan bermukim tenaga kerja berdasarkan karakteristik yang dimilikinya sebagai calon penghuni sehingga tercipta hunian yang akomodatif terhadap penghuninya. Pemenuhan hunian yang sesuai dengan preferensi bermukim akan memberikan kenyamanan dan kepuasan serta dapat berdampak pada peningkatan produktifitas tenaga kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi bermukim tenaga kerja kawasan industri Makassar. Preferensi bermukim tenaga kerja merupakan kecenderungan atau keinginan tenaga kerja untuk bertempat tinggal atau tidak bertempat tinggal di suatu tempat. Dalam proses bermukim tersebut, terdapat interaksi antara tenaga kerja sebagai penghuni dengan lingkungan hunian yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kecenderungan atau keinginan tenaga kerja untuk bermukim dapat dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi, karakteristik hunian dan lingkungan hunian tenaga kerja.

## METODE PENELITIAN

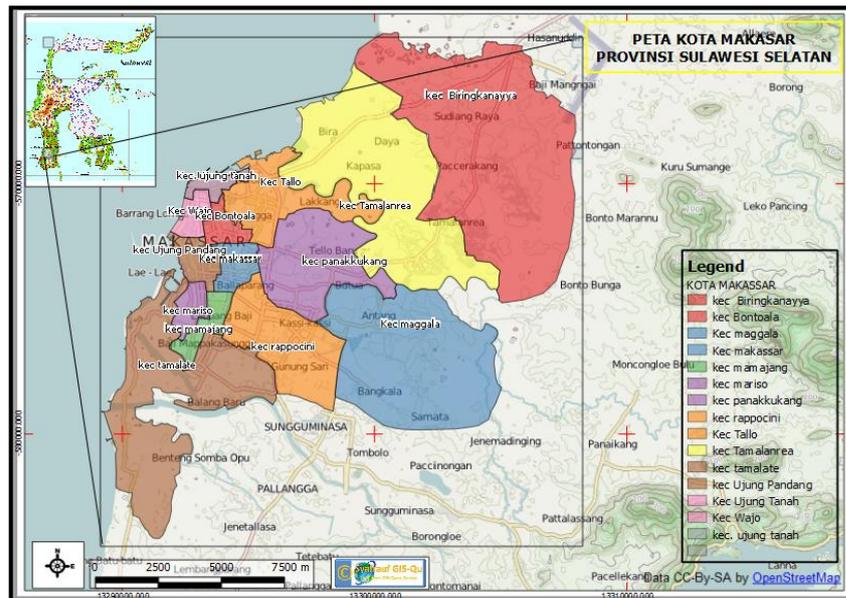
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Preferensi Bermukim Tenaga Kerja Kawasan Industri Makassar” adalah menggunakan pendekatan positivistik dengan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei yang dilakukan terhadap sampel yang diambil dari populasi untuk mengetahui pendapat, karakteristik atau perilaku dirinya sendiri. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber data pertama yaitu tenaga kerja Kawasan Industri Makassar dengan menggunakan metode kuesioner. Sedangkan data sekunder merupakan pendukung data primer yang didapatkan melalui kajian literatur dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *Probability Sampling*. *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jenis *Probability sampling* dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling*.

## GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

### Kota Makassar

Secara administratif, Kota Makassar terbagi dalam 14 wilayah kecamatan dengan 142 kelurahan, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- Sebelah Barat : Selat Makassar



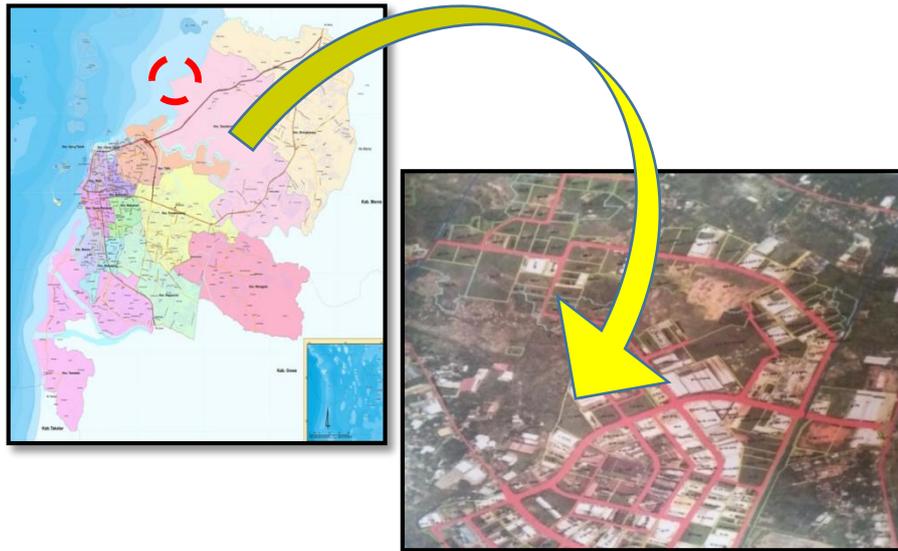
Sumber : RTRW Kota Makassar

**GAMBAR 1.**  
**PETA KOTA MAKASSAR**

Dibagian utara kota terdiri dari Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri dari Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terdiri dari Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Di bagian barat terdiri dari Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Sektor perindustrian khususnya industri pengolahan merupakan penyumbang PDRB kedua setelah perdagangan, hotel, dan restoran yaitu sebesar 22,24% per 2008. Pusat industri pengolahan ini berada di sebelah utara kota yakni Kawasan Industri Makassar (KIMA).

### Kawasan Industri Makassar

Kawasan industri Makassar yang terletak di kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ini mulai dibangun dengan diawali pembebasan lahan pada tahun 1972 dan berlangsung selama sebelas tahun tepatnya pada tahun 1983 dengan status menjadi badan pengelola. Dari badan pengelola kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang dikelola oleh suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan nama PT. (Persero) KIMA dengan luas lahan 703 Ha.



Sumber: [www.ptkimamakassar.co.id](http://www.ptkimamakassar.co.id)

**GAMBAR 2.**  
**LOKASI KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR**

Kawasan Industri Makassar dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan utilitas pelengkap. Sejumlah sarana dan prasarana tersebut memberikan kenyamanan dan menjadi sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan aktifitas di dalam kawasan. Beberapa fasilitas yang tersedia dalam Kawasan Industri Makassar adalah sebagai berikut:

**1. Kantor Pengelola Kawasan Industri Makassar**

Kantor pengelola PT KIMA merupakan kantor pusat pengelolaan kawasan. Bentuk pelayanan satu atap merupakan komitmen pengelola untuk memberikan yang kemudahan dalam pelayanan. Kantor PT KIMA terdiri dari ruang administrasi, keuangan, unit divisi, ruang serba guna, mesjid dan pos pengamanan.



Sumber: Dokumentasi, 2016

**GAMBAR 3.**  
**KANTOR PENGELOLA PT KIMA MAKASSAR**

**2. Sistem Keamanan**

Sistem keamanan dalam kawasan Industri Makassar menggunakan pengamanan 24 jam. Beberapa petugas keamanan melakukan patroli secara silih berganti pada setiap area dalam lingkungan kawasan. Sistem keamanan juga dilengkapi dengan pemasangan beberapa kamera CCTV pada beberapa titik yang dianggap perlu terutama pada setiap akses masuk menuju kawasan industri.



Sumber: Dokumentasi, 2016

**GAMBAR 4.**  
**SISTEM KEAMANAN KIMA MAKASSAR**

### 3. Jaringan Jalan dan Drainase

Prasarana jalan dan drainase merupakan prasarana penting untuk mendukung kelancaran kegiatan dalam kawasan. Lebar jalan dalam kawasan industri Makassar bervariasi antara 16 meter, 20 meter dan 28 meter. Beberapa ruas jalan menggunakan median jalan. Jaringan jalan yang lebar memudahkan kendaraan terutama kendaraan roda 6 keatas untuk mengakses keluar masuk kawasan industri. Lapisan permukaan jalan menggunakan *paving block* yang hingga saat ini masih dalam kondisi baik. Kawasan industri Makassar juga dilengkapi dengan jaringan drainase dengan saluran tertutup dan terbuka.



Sumber: Dokumentasi, 2016

**GAMBAR 5.**  
**JARINGAN JALAN DAN DRAINASE KIMA MAKASSAR**

### 4. Rumah Susun Sederhana Sewa

Kawasan industri Makassar (KIMA) memiliki rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bekerja di dalam kawasan industri tersebut. Rusunawa yang dibangun pada tahun 2010 dikelola oleh divisi pengelola rusunawa Kawasan Industri Makassar terdiri dari dua bangunan *twin block* dan terletak di jalan Kima delapan dan jalan Kima Sepuluh.



Sumber: Dokumentasi, 2016

**GAMBAR 6.**  
**RUSUNAWA KIMA MAKASSAR**

## KAJIAN LITERATUR

### Perumahan dan Permukiman

Dalam bahasa Inggris, rumah memiliki dua arti, yaitu *house* dan *home*. Rumah dalam arti *house* dapat digambarkan bagaikan sebuah kandang. Gambaran ini menempatkan rumah dalam pengertian umum, yaitu rumah sebagai suatu tempat berlindung yang bersifat fisik. Sedangkan rumah dalam arti *home* memiliki arti khusus sebagai kampung halaman. Sebagai kampung halaman, keberadaan rumah mengacu kepada konsep-konsep sosial kemasyarakatan, yaitu kehidupan yang terjalin di dalam bangunan. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (UU No. 1/2011). Perumahan juga dikenal dengan istilah *housing*. *Housing* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan tidak sama dengan permukiman. Permukiman merupakan lingkungan tempat tinggal manusia dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung perikehidupan dan penghidupan para penghuninya.

### Lingkungan Perumahan

Untuk mendukung kehidupan yang ada di dalamnya, suatu lingkungan perumahan dan permukiman dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang. Fasilitas-fasilitas yang harus tersedia dalam perumahan dan permukiman adalah prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Terdapat delapan jenis prasarana lingkungan hunian (SNI 03-1733-2004), yaitu jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi lokal. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Terdapat tujuh jenis sarana lingkungan yang sangat diperlukan masyarakat dan harus tersedia di lingkungan perumahan dan permukiman (SNI 03-1733-2004), yaitu sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan sarana ruang terbuka.

### Preferensi Bermukim

*Preference* berarti kecenderungan atau memilih. Preferensi merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih. Preferensi bermukim merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk

memilih menetap atau bertempat tinggal pada suatu lokasi tertentu. Menurut Sinulingga (1999) preferensi bermukim adalah keinginan atau kecenderungan seseorang untuk bermukim atau tidak bermukim di suatu tempat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

## ANALISIS

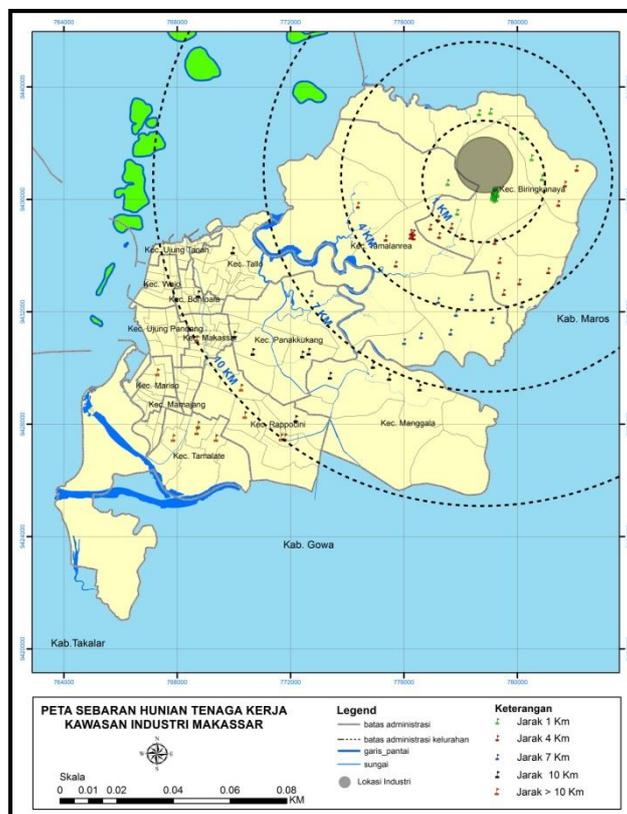
Mayoritas tenaga kerja kawasan industri Makassar merupakan tenaga kerja produktif dengan umur rata-rata 21 – 30 tahun, berstatus sudah menikah dengan 1 hingga 2 orang anak. Jumlah anggota keluarga tenaga kerja yang berumur 21 – 30 tahun umumnya 1 – 3 orang dalam satu hunian, jumlah anggota keluarga tersebut didominasi tenaga kerja yang belum menikah dan memilih tinggal sendiri dengan menyewa hunian. Tenaga kerja kawasan industri Makassar sebagian besar menggunakan waktu 30 menit hingga 1 jam berinteraksi sosial dengan tetangga di lingkungan hunian mereka. Tingkat pendidikan mayoritas tenaga kerja yaitu setingkat SMA kemudian disusul setingkat S1 dan sebagian kecil yang berpendidikan D3. Adapun jenis kelamin tenaga kerja terdiri dari 72% tenaga kerja laki-laki dan 28% tenaga kerja perempuan.

Tenaga kerja kawasan industri Makassar memiliki penghasilan rata-rata Rp. 2.000.001 s.d Rp. 3.500.000 dan pengeluaran rata-rata Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 dan Rp. 2.000.001 s.d Rp. 3.500.000 setiap bulan. Status pekerjaan tenaga kerja terdiri dari 52% tenaga kerja tetap, 27% tenaga kerja kontrak dan 21% tenaga kerja outsourcing. Tenaga kerja tetap umumnya memiliki penghasilan Rp. 3.500.000 s.d Rp. 5.000.000 dan pengeluaran Rp. 2.000.001 s.d Rp. 3.500.000, tenaga kerja kontrak umumnya memperoleh penghasilan Rp. 2.000.001 s.d Rp. 3.500.000 dan pengeluaran Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 sedangkan tenaga kerja outsourcing umumnya memiliki penghasilan Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000 dan pengeluaran Rp. 1.000.001 s.d Rp. 2.000.000. Umumnya tenaga kerja menghabiskan biaya transportasi < Rp. 200.000 setiap bulan. Tenaga kerja mampu menekan biaya transportasi karena umumnya mereka menggunakan kendaraan pribadi (motor) menuju tempat kerja. Selain itu, jarak hunian yang dekat dengan lokasi kerja mempengaruhi rendahnya biaya transportasi tenaga kerja.

Hunian tenaga kerja kawasan industri Makassar sebagian besar didapatkan melalui sistem pengadaan informal. Hunian informal dengan status milik menjadi pilihan mayoritas tenaga kerja yaitu sebanyak 48,3% kemudian disusul status menumpang sebanyak 32,8%. Tenaga kerja yang saat ini mayoritas menghuni hunian status milik atau sebanyak 42% umumnya berbentuk rumah tapak. Rumah tapak menjadi hunian hampir seluruh tenaga kerja yaitu sebanyak 80%. Sedangkan rumah susun dihuni oleh 15% tenaga kerja dengan status sewa. Lama hunian rata-rata tenaga kerja kurang dari 5 tahun. Lama hunian yang relatif masih singkat karena usia mayoritas tenaga kerja 21 – 30 tahun dengan kecenderungan masa kerja kurang dari lima tahun yang umumnya mereka menempati hunian ketika mereka mulai bekerja di kawasan industri. Adapun jumlah kamar hunian tenaga kerja mayoritas memiliki 2 kamar dengan luas 22 – 36 m<sup>2</sup>.

Hunian informal yang menjadi pilihan mayoritas tenaga kerja kawasan industri Makassar didasarkan pada pertimbangan harga yang lebih terjangkau dan memiliki lokasi yang dekat dengan lokasi kerja. Pilihan hunian informal memberikan konsekuensi terhadap minimnya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan hunian. Sebanyak 81% tenaga kerja menganggap kondisi sarana dan prasarana di lingkungan hunian mereka dengan kriteria cukup, 16% menganggap buruk dan 3% yang menilai baik. Beberapa sarana dan prasarana yang dianggap cukup diantaranya jaringan jalan, air bersih, persampahan dan sejumlah sarana lingkungan kecuali kebudayaan rekreasi dan ruang terbuka yang masuk dalam kriteria buruk. Jaringan drainase yang umumnya juga digunakan untuk membuang air limbah umumnya tidak berfungsi dengan baik (buruk). Adapun sarana dan prasarana

lingkungan yang dianggap memadai adalah jaringan telekomunikasi. Adanya jaringan telekomunikasi nirkabel membuat hampir seluruh wilayah Makassar dan sekitarnya yang menjadi lokasi hunian tenaga kerja terjangkau jaringan telekomunikasi dengan baik. Adapun kondisi non fisik lingkungan seperti keamanan dan ketenangan, umumnya tenaga kerja menganggap cukup aman dan tenang.



Sumber : Hasil Analisis, 2016

**GAMBAR 7.**  
**PETA SEBARAN HUNIAN TENAGA KERJA KIMA MAKASSAR**

Preferensi bermukim adalah kecenderungan atau keinginan untuk memilih menetap atau tidak menetap di suatu tempat. Mayoritas tenaga kerja tidak berpikir pindah hunian atau sebanyak 59%, tenaga kerja yang berpikir pindah hunian sebanyak 32%, tenaga kerja yang rencana pindah hunian sebanyak 7% dan terdapat 2% yang siap pindah hunian saat ini. Preferensi bermukim tenaga kerja secara signifikan dipengaruhi oleh status perkawinan, tipe hunian, status kepemilikan dan ketenangan lingkungan. Tenaga kerja yang sudah menikah cenderung tidak memikirkan untuk pindah hunian. Tenaga kerja yang tidak berpikir untuk pindah hunian terutama mereka yang sudah memiliki 1 hingga 2 anak dengan status rumah milik. Rumah milik yang dihuni dianggap sesuai dengan kebutuhan keluarga saat ini. Sedangkan tenaga kerja yang belum menikah lebih cenderung berpikir untuk pindah hunian walaupun belum menentukan waktu yang tepat untuk pindah. Bahkan tenaga kerja yang belum menikah juga cenderung sudah memiliki rencana pindah hunian. Mayoritas tenaga kerja yang belum menikah menghuni rumah sewa dan masih menumpang sehingga mereka sudah mulai berpikir untuk mencari hunian lain dan memisahkan diri dari ketergantungan dengan orang tua atau keluarga. Adapun tenaga kerja yang berstatus janda/duda sebagian tidak berpikir pindah hunian karena saat ini menempati hunian milik yang sesuai dengan

kebutuhan keluarga sedangkan sebagian lainnya berpikir pindah hunian karena mereka masih menempati hunian rumah susun.

Tenaga kerja yang saat ini menghuni rumah susun mayoritas tidak berpikir untuk pindah hunian. Sedangkan tenaga kerja yang berpikir pindah hunian didominasi oleh tenaga kerja yang saat ini menghuni rumah panggung. Adapun tenaga kerja yang rencana pindah mayoritas diinginkan oleh tenaga kerja yang menghuni rumah tapak. Tenaga kerja yang tidak berpikir pindah hunian disebabkan karena rumah susun sederhana sewa yang dihuni saat ini dekat dengan lokasi kerja dan harga yang lebih terjangkau. Sedangkan tenaga kerja yang menghuni rumah panggung dan rumah tapak yang berpikir dan rencana pindah hunian karena status mereka masih menumpang di rumah orang tua atau keluarga. Umur mereka umumnya 21 – 30 tahun dengan status belum menikah. Mereka mulai berpikir bahkan rencana pindah hunian agar bisa hidup lebih mandiri dengan usaha dan penghasilan sendiri.

Tenaga kerja yang menempati hunian milik saat ini sebagian besar atau 78,6% tidak berpikir pindah hunian, 19% mulai berpikir untuk pindah hunian dan hanya 2,4% yang sudah memiliki rencana pindah hunian. Adapun tenaga kerja yang saat ini menghuni hunian sewa sebagian besar juga tidak berpikir pindah hunian atau sebanyak 51,9% karena saat ini mereka menghuni rusunawa. Mereka tidak berkeinginan untuk pindah karena rusunawa yang ditempati saat ini dekat dengan lokasi kerja, biaya sewa yang murah dan kondisi hunian yang memadai. Tenaga kerja penghuni hunian sewa yang berpikir pindah sebanyak 44%. Tenaga kerja tersebut umumnya menghuni rumah tapak sewa/kos dengan kondisi hunian dan lingkungan yang kurang memadai walaupun sebagian cukup dekat dengan lokasi kerja. Untuk tenaga kerja yang menumpang mayoritas berpikir untuk pindah hunian. Jarak rumah orang tua atau keluarga yang jauh dari lokasi kerja menyebabkan biaya transportasi lebih besar.

Tenaga kerja dengan ketenangan lingkungan hunian yang cukup dan baik mayoritas tidak berpikir untuk pindah hunian. Walaupun sama-sama tidak berpikir pindah hunian akan tetapi persentase kondisi ketenangan lingkungan hunian yang baik lebih besar daripada kondisi cukup. Sedangkan kategori kondisi lingkungan yang cukup lebih banyak yang berpikir untuk pindah hunian daripada kategori kondisi ketenangan baik. Lingkungan hunian yang tenang memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi tenaga kerja. Sebaliknya kondisi ketenangan lingkungan yang buruk cenderung mengakibatkan tenaga kerja untuk berpikir pindah bahkan rencana pindah hunian ke tempat yang lebih tenang.

## KESIMPULAN

Preferensi bermukim adalah kecenderungan atau keinginan untuk memilih menetap atau tidak menetap di suatu tempat. Preferensi bermukim tenaga kerja dibagi menjadi empat kategori, yaitu tidak berpikir untuk pindah hunian, berpikir pindah hunian tapi belum menentukan waktu yang tepat, rencana pindah hunian dan siap untuk pindah hunian. Mayoritas tenaga kerja tidak berpikir pindah hunian atau sebanyak 59%, tenaga kerja yang berpikir pindah hunian sebanyak 32%, tenaga kerja yang rencana pindah hunian sebanyak 7% dan terdapat 2% yang siap pindah hunian saat ini. Preferensi bermukim tenaga kerja dipengaruhi oleh status kepemilikan, tipe hunian, status perkawinan dan ketenangan lingkungan.

Tenaga kerja yang tidak berpikir pindah hunian 55,9% merupakan tenaga kerja yang saat ini menempati hunian dengan status milik. Hunian dengan status milik memberikan kepuasan tersendiri bagi tenaga kerja. Mereka dapat mengubah bentuk atau menambah luas hunian sesuai

dengan kebutuhan dan keinginan. Sebanyak 23,7% yang tidak berpikir pindah hunian adalah tenaga kerja yang menempati rumah susun dengan status sewa. Jarak hunian dan harga sewa yang lebih terjangkau menjadi pertimbangan tenaga kerja dalam memilih hunian tersebut. Adapun tenaga kerja yang menumpang dan tidak berpikir pindah hunian sebanyak 15,3% umumnya merupakan tenaga kerja outsourcing. Walaupun status mereka masih menumpang, akan tetapi mereka tidak berpikir pindah hunian karena status pekerjaan mereka yang belum tetap dan penghasilan mereka yang relatif rendah untuk menjangkau hunian sendiri baik membeli maupun menyewa.

Untuk tenaga kerja yang berpikir pindah hunian sebanyak 32% umumnya tenaga kerja yang masih menumpang dan menyewa hunian. Status mereka yang masih menumpang dan belum menikah sehingga mulai berpikir pindah hunian walaupun belum mengetahui waktu yang tepat untuk pindah hunian. Sedangkan tenaga kerja yang menempati hunian sewa dan berpikir pindah hunian disebabkan karena status hunian sewa sehingga cenderung berpikir pindah ke hunian milik baik tipe rumah tapak maupun rumah susun. Untuk tenaga kerja yang menghuni hunian milik dan berpikir pindah hunian disebabkan karena jarak hunian mereka saat ini > 10 km sehingga mereka berpikir pindah ke tempat yang lebih dekat dengan lokasi kerja. Tenaga kerja yang rencana dan siap untuk pindah hunian masing-masing sebesar 7% dan 2% didominasi oleh tenaga kerja yang menumpang. Status kepemilikan dan jarak hunian > 10 km menjadi faktor yang mempengaruhi rencana dan siap pindah hunian. Dengan tingkat penghasilan yang lebih baik, mereka sudah merencanakan waktu yang tepat untuk pindah hunian bahkan mereka siap untuk pindah hunian saat ini.

Preferensi bermukim tenaga kerja kawasan industri Makassar berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, hunian dan lingkungan hunian yang dimiliki cenderung menginginkan jarak hunian dengan lokasi kerja  $\leq 3$  km dengan hunian status milik baik berbentuk rumah tapak maupun rumah susun. Adapun luas hunian yang diinginkan oleh tenaga kerja adalah hunian yang lebih luas daripada hunian mereka saat ini. Jarak hunian yang dekat dengan lokasi kerja merupakan salah satu solusi mengurangi beban pengeluaran dan dapat meningkatkan produktifitas. Sedangkan status kepemilikan dan hunian yang lebih luas memberikan kepuasan bagi tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2015. *Sensus Penduduk 2015*.

Sadana, Agus S. 2014. *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sinulingga, Budi D. 1999. *Pembangunan Kota : Tinjauan Regional dan Lokal*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

SNI 03-1733-2004: *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan*.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

[www.ptkimamakassar.co.id](http://www.ptkimamakassar.co.id). Di akses pada tanggal 1 Februari 2016.